

OPINI

KAMIS 9 JANUARI 2014

Masa Depan Reformasi Hukum

Seorang filsuf aliran

Marxist Ernst Bloch

(1885-1977) pernah,

dalam kuliahnya,

memberi pertanyaan

yang dia jawab sendiri.

"Apakah harapan

bisa mengecewakan?"

Jawabnya, tentu dapat

mengecewakan. Namun,

harapan itu sendiri

sesungguhnya tidak

mudah dikecewakan

(Franz Magnis Suseno,

2013:148).

Oleh R Muhammad Mitradi

kepeluasan sudah menjadi rutinitas. Bukan sesuatu yang mengejutkan.

Salah satu yang paling sering mengecewakan adalah hukum. Ketika pasal-pasal hukum menegaskan larangan korupsi. Maka, larangan tadi ditingkari. Bukan saja oleh adresat yang dituju oleh larangan pasal tadi. Bahkan, penegak pasal hukum menjadi bagian pelaku korupsi. Padahal, kata Satjipto Rahardjo, "hukum adalah bisnis kepercayaan." Jika kita sudah mengendap dalam penegakan hukum, tidak ayal lagi hukum kehilangan eksistensinya.

Reformasi hukum

Ada cita-cita mula memperbaiki hukum. Dikatakan istilah "reformasi hukum" atas usaha perbaikan tadi. Reformasi hukum menawarkan angin segar bagi tegaknya supremasi hukum. Sayangnya, tidak hanya gagal, kata "reformasi" itu sendiri sekarang sudah sekarat. Diilupkan orang. Malah, dihilang sebagai malapetaka. Lalu bernimpi ingin kembali ke zaman "normal." Zaman Orde Baru yang meski sekian puluh tahun ekonomi lumayan baik, namun didasari oleh bangkai dusta, intrik dan manipulasi kroni di akhir rezim itu.

Pesimistik pada reformasi hukum pasti bukan jalan keluar. Tapi, optimisme membihi buta juga racun sulit diobati. Memelihara "jalan tengah"

antara skeptis dan optimis memang bukan hal mudah. Tapi, hanya itu yang tersisa. Dengan begitu, kita harus pandai-pandai mengkluster dan mengampulasi ruang busuk dari hukum. Memberi rakt pada pulau-pulau integritas: sebuah ranah harapan bagi masa depan lebih baik.

Berangkat dari mana?

Saya percaya, tida hukum tanpa penegaknya. Memulai memulihkan hukum harus diawali dari memastikan penegak hukum adalah orisinal menegakkan hukum. Bukan "garong" berwujud malakat. Untuk itu, sumber asli penegak hukum harus dibenahi. Pertama, perguruan tinggi. Pertbaikan kurikulum, kapasitas dosen dan metode pembelajaran disiplin ilmu hukum yang tidak lagi menyembah berhala "pasar", "uang" dan "kapitalisme" mendesak menjadi prioritas. Caranya dengan memastikan kompetensi berjalan linear bersama integritas. Di wilayah ini perlu sistem dan keteladanan bekerja sinergis satu sama lain.

Kedua, rekrutmen penegak hukum. Berbagai strategi dan model rekrutmen harus dibuka peluangnya. Seperti, jelang jabatan ala Jokowi-Ahok, boleh juga dipertimbangkan dalam rekrutmen pejabat penegak hukum. Dengan begitu, uang tidak lagi menjadi "Tuhannya." Kapabilitas dan integritas yang selaras dengan kompetensi—sekalipun—menjadi instrumen utama. Ketiga, sinkretisme penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) secara

proporsional harus ditanam dalam sistem penegakan hukum. Selama ini media dan publik abai pada prestasi penegak hukum yang baik. Sibuk mengujat oknum penegak hukum yang buruk. Padahal tidak sedikit penegak hukum dan institusi yang baik. Hadim Agung Ardiyo Al Kostar dan lembaga KPK, misalnya, contoh nyata penegak dan institusi hukum yang bersih serta berkomitmen nyata membertantas korupsi.

Akibat ketidadaan apresiasi, tidak ada insentif bagi yang berbuat baik. Apalagi berprestasi. Dalam kondisi demikian, perlu ada keseriusan untuk memadukan kembali "reward" dan "punishment" dalam napas reformasi hukum.

Tiga gagasan di atas bukan hal baru. Bukan pula resep mujarab bagi semua penyakit (panacea). Sebenarnya, perkaranya terletak pada komitmen memastikan satu padunya kata dan perbuatan. Konsistensi merupakan kekuatan perekat.

Dengan demikian, masa depan reformasi hukum bisa jadi dapat dimaknai sebagai proses yang tiada terhenti, terus dialektis ala Hegelian. Yang diuji waktu untuk menjawab: adakah keseriusan pемangku kepentingan hukum mengembalikan marwah hukum. Sebuah kemuliaan yang selama ini tergedai oleh rakusnya kekuasaan. (Penulis adalah Staf Ahli Komite III Dewan Perwakilan Daerah RI dan Dosen FH Universitas Pakuan, Bogor)

SENGAJA tulisan ini dibuka dengan soal-soal harapan dan kekecewaan. Sebab, Indonesia pasca reformasi adalah sebuah negeri yang tidak lagi mudah gusur dengan kecewaan, apalagi galau oleh harapan. Karena, kekecewaan dan